

FORMULASI INDEKS DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA

Awan Santosa, S.E, M.Sc

Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Abstrac

This research aims at identifying the variables (indicators) related to economic democracy in Indonesia and formulating the Index of Indonesia Economic Democracy. The Formulation of Indonesia Economic Democracy Index had done by applying of Delphi Method which based on 10 Indonesian economic democracy expert judgement. The research also use normative and theoretical literature study as reference. Delphi Method was deliver in 2 round using email and questionare directly sending.

The research finding show three dimension of Indonesia Economic Democracy Index arrangement. First, Production Democracy dimension (DP) with indicators: open unemployment, disguised unemployment, dan ratio between wage and company omzet. Second, Alocation dan Consumption Democracy (DAK) dimension with indicators: proportion of social safety spending for the poor in the local state budget and ratio of 40% lower income into total income. Third. Democracy of Production Factor Controlling (DPFP) dimension with indicators: APBD to PDRB ratio, PAD to APBD ratio, domestic financing to APBD ratio, APBD to natural resource exploitation omzet ratio, domestic investment to total investment ratio, SME's investment to PDRB ratio, loan to deposit ratio, land ownership average, education spending to APBD ratio, health spending to APBD ratio, rate of schooling, cooperative member to citizen ratio, cooperative omzet to PDRB ratio. Ratio of labor union ownership, member of labor union to total labor ratio, and ratio of employee share ownership. The formula of Indonesia Economic Democracy Index which had agreement form expert considering weight score value is: $IDEI = (0,79)DP + (0,93)DAK + (0,86)DPFP$.

Key Words: *Production Democracy, Alocation dan Consumption Democracy, Democracy of Production Factor Controlling*

Latar Belakang

Konsep demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan sudah lama dipikirkan dan dikembangkan secara khusus oleh pakar ekonomi di dalam maupun di luar negeri dengan berbagai varian pengertian

dan ciri-cirinya (Douglas (1920), Carnoy (1980), Dahl (1985), Poole (1987), dan Smith (2000)). Konsep ini bahkan sudah dipikirkan ekonom Indonesia, khususnya M. Hatta, sejak tahun 1930 yang kemudian dirumuskan ke dalam konstitusi (Pasal 33 UUD 1945). Konsep ini terus dikembangkan

oleh ekonom-ekonom Indonesia dengan berbagai ragam terminologi (Mubyarto (1980), Swasono (1987), Arief (2000), dan Baswir (2002).

Demokrasi ekonomi di Indonesia dipandang para pendiri bangsa sebagai cara untuk memerdekakan ekonomi bangsa. Demokrasi ekonomi merupakan bagian dari agenda reformasi sosial, yaitu mengganti sistem ekonomi kolonial dengan sistem ekonomi nasional, guna menghapus pola hubungan ekonomi yang timpang, eksploitatif dan sub-ordinatif terhadap ekonomi rakyat Indonesia dan mengubah struktur sosial-ekonomi warisan kolonial yang jauh dari nilai-nilai keadilan sosial tersebut.

Sistem ekonomi kolonial mewariskan struktur ekonomi yang sangat timpang di mana kelompok atas meskipun jumlahnya sedikit namun menguasai dan menikmati banyak surplus perekonomian nasional. Hal yang berkebalikan menimpa kelompok ekonomi bawah yang jumlahnya mayoritas namun menguasai dan menikmati hasil produksi dalam taraf yang sangat minimal.

Hatta memandang bahwa perbaikan kondisi ekonomi rakyat tidak mungkin hanya disandarkan pada proklamasi kemerdekaan. Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur

ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Karno, yang dimaksud dengan struktur ekonomi nasional adalah sebuah struktur perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat Indonesia dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air.

“Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia” (Hatta, 1960).

Pasca krisis moneter 1997/1998 konsep demokrasi ekonomi dijadikan sebagai alternatif solusi melalui pembuatan TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Pada saat ini pun, seiring pelaksanaan otonomi daerah (Otda) banyak daerah secara eksplisit menyatakan demokrasi ekonomi sebagai bagian dalam visi, misi, dan strategi pembangunannya. Kenyataan ini menunjukkan makin pentingnya orientasi pembangunan pada kemakmuran masyarakat dan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan demokrasi ekonomi (Mubyarto, 1997).

Namun perkembangan pemikiran ke arah demokrasi ekonomi ini tidak diikuti perkembangan bangunan konsep, teori, dan operasionalisasi demokrasi ekonomi. Sampai saat ini belum ada suatu indikator yang menjadi ukuran penyelenggaraan demokrasi ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Demokrasi ekonomi masih sebatas konsep yang bersifat filosofis, normatif, dan politis. Belum tersedianya model dan alat ukur ini menjadikan agenda-agenda pembangunan daerah yang berbasis demokrasi ekonomi terlalu abstrak dan tidak memiliki arah yang jelas.

Rumusan Masalah

- 1) Belum ada variabel ekonomi spesifik dan terukur yang disepakati dan ditetapkan sebagai indikator penyelenggaraan demokrasi ekonomi di Indonesia
- 2) Belum ada indikator komprehensif yang dapat dijadikan sebagai acuan penyelenggaraan dan penilaian derajat demokrasi ekonomi pada setiap daerah di Indonesia

Tujuan Penelitian

- 1) Menentukan indikator (variabel) terpilih penyusun Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia
- 2) Memformulasikan Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia

Hasil Penelitian Aplikasi Metode Delphi

Sesuai rencana aplikasi Metode Delphi dalam penelitian ini maka distribusi instrumen penelitian kepada para-ahli dilakukan sebanyak dua kali (dua putaran). 10 ahli yang menjadi responden Delphi dalam penelitian ini selengkapnya adalah: Prof. Dr. San Afri Awang, MSc (Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc (ekonom, Rektor UII, dan Staf Ahli PUSTEK UGM), Drs. Revrisond Baswir, MBA (ekonom dan mantan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM), Dr. Noer Sutrisno, MEc (ekonom IPB, dan Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia), Dr. Fahmi Radhi, MBA (ekonom, Direktur Program Diploma Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, dan Staf Ahli PUSTEK UGM), Ichsanudin Noorsy, SH, MSc (ekonom, Tim Indonesia Bangkit (TIB), dan Staf Ahli PUSTEK UGM), Dr. Muhammad Fadhil Hasan, MEc (ekonom, dosen IPB, dan Staf Ahli INDEF), Henry Saragih (Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Sekjen La Via

Campesina), Dr. Ahmad Erani Yustika, MEd (ekonom, dosen Universitas Brawijaya, dan Peneliti INDEF), Drs. Hudiyanto (ekonom, dosen UMY, dan Peneliti PUSTEK UGM)

Selengkapnya hasil penilaian ahli terhadap instrumen penelitian yang berupa rancangan (hipotetik) Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia diuraikan di bawah ini:

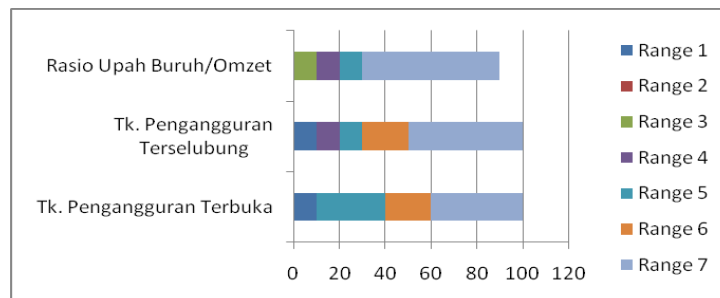
a. Temuan Aplikasi Metode Delphi Putaran I

1). Variabel Dimensi Demokrasi Produksi (DP) = X

Pada dimensi demokrasi produksi variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (X1) terdapat 4 (40%) ahli (Delphi) yang menilai pada *range* 7 (maksimum), 2 Delphi (20%) menilai pada *range* 6, 3 Delphi (30%) menilai pada *range* 5, dan 1 Delphi (10%) yang menilai pada *range* 1 (minimum). Nilai Skor Variabel Tingkat Pengangguran

Terbuka Rata-Rata adalah sebesar 0,812, di atas Batas Minimum Persetujuan sebesar 0,712. Pada variabel Tingkat Pengangguran Terselubung (X2) terdapat 5 Delphi (50%) yang menilai dalam *range* 7, 2 Delphi (20%) menilai pada *range* 6, 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 5, 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 4, dan 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 1. Nilai Skor Variabel Tingkat Pengangguran Terselubung Rata-Rata adalah sebesar 0,771, masih sedikit di atas batas minimum persetujuan. Pada variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan (X3) terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada *range* 7, 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 5, 1 Delphi (10%) pada *range* 4, dan 1 Delphi (10%) menilai pada *range* 3. Nilai Skor Variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan adalah sebesar 0,800, di atas batas minimum persetujuan.

Tabel 1. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi Demokrasi Produksi (DP)

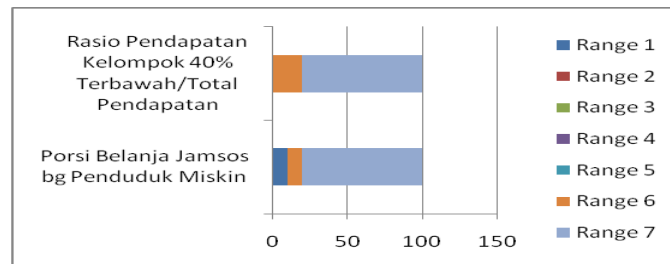


2). Variabel Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) = Y

Pada dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi Variabel Proporsi Belanja Jaminan Sosial Bagi Penduduk Miskin Terhadap Total Belanja (Y1) terdapat 8 Delphi (80%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 1 Delphi (10%) pada range 1. Nilai Skor Variabel Proporsi Belanja Jaminan Sosial Bagi Penduduk Miskin Terhadap Total Belanja Daerah Rata-Rata adalah sebesar

0,900, di atas batas minimum persetujuan. Pada dimensi Variabel Proporsi Pendapatan 40% Kelompok Terbawah Terhadap Total Pendapatan (Y2) terdapat 8 Delphi (80%) yang menilai pada range 7 dan 2 Delphi (2%) menilai pada range 6. Nilai Skor Variabel Proporsi Pendapatan 40% Kelompok Terbawah Terhadap Total Pendapatan adalah sebesar 0,971, jauh di atas batas minimum persetujuan.

Tabel 2. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK)



3). Variabel Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP)= Z

Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk faktor produksi, yaitu faktor produksi material, intelektual, dan institusional. Selengkapnya pembahasan terhadap masing-masing bentuk faktor produksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Variabel Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Material

Pada Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Material Variabel Proporsi APBD terhadap PDRB (Z1) terdapat 3 Delphi (30%) yang menilai pada range 7, 2 Delphi (20%) menilai pada range 6, 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Proporsi APBD terhadap

PDRB Rata-Rata adalah sebesar 0,814, di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Proporsi PAD terhadap APBD (Z2) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 1. Nilai Skor Variabel Proporsi PAD terhadap APBD Rata-Rata adalah sebesar 0,785, di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Proporsi Pembiayaan Domestik terhadap APBD (Z3) terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi (20%). Nilai Skor Variabel Proporsi Pembiayaan Domestik terhadap APBD Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi APBD terhadap Total Omzet Hasil Eksploitasi SDA di Daerah (Z4) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7, 3 Delphi (30%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi (20%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 1. Nilai Skor Variabel Proporsi APBD terhadap Total Omzet Hasil Eksploitasi SDA di Daerah Rata-Rata adalah sebesar 0,814, di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Proporsi Konsumsi Perkapita terhadap Kredit Konsumsi Perkapita (Z5) terdapat 2 Delphi (20%) yang menilai pada range 7, 3 Delphi (30%) menilai pada range 6, dan 2

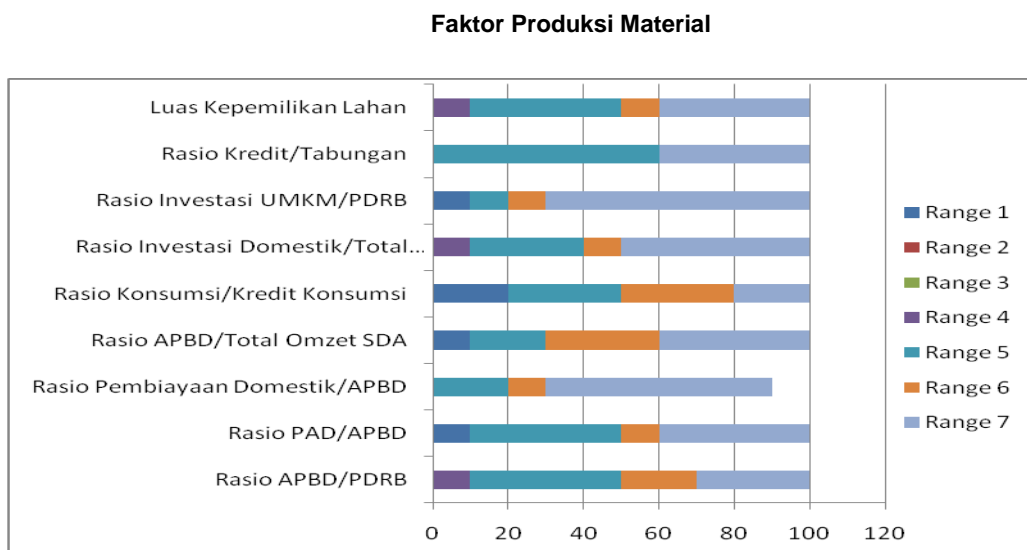
Delphi (20%) pada range 5, dan 2 Delphi (20%) menilai pada range 1. Nilai Skor Variabel Proporsi Konsumsi Perkapita terhadap Kredit Konsumsi Perkapita Rata-Rata adalah sebesar **0,700**, atau **di bawah batas minimum persetujuan**.

Pada Variabel Proporsi Investasi Domestik Terhadap Total Investasi (Z6) di Daerah terdapat 5 Delphi (50%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 3 Delphi (30%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Proporsi Investasi Domestik Terhadap Total Investasi di Daerah Rata-Rata adalah sebesar 0,857, di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Proporsi Investasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap PDRB (Z7) terdapat 7 Delphi (70%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 1 Delphi (10%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 1. Nilai Skor Variabel Proporsi Investasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap PDRB Rata-Rata adalah sebesar 0,871, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Kredit terhadap Tabungan (Z8) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7 dan 6 Delphi (30%) menilai pada range 5. Nilai Skor Variabel Proporsi Kredit terhadap

Tabungan Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Rata-Rata Luas Kepemilikan Lahan (Tanah) (Z9) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Rata-Rata Luas Kepemilikan Lahan (Tanah) Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan.

Tabel 3. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Demokrasi Penguasaan



a. Variabel Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Intelektual

Pada Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Intelektual Variabel Proporsi Belanja Pendidikan dalam APBD (Z10) terdapat 6 Delphi (60%) yang

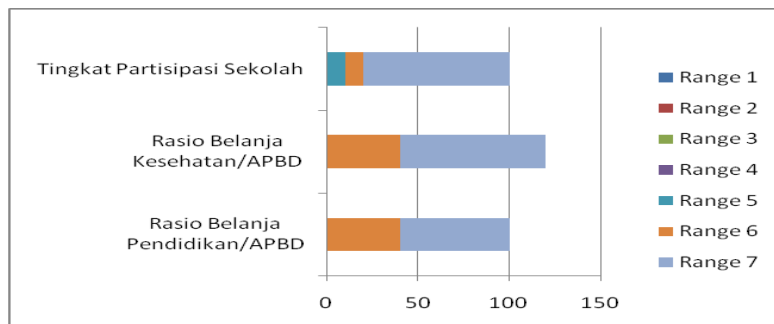
menilai pada range 7 dan 4 Delphi (40%) menilai pada range 6. Nilai Skor Variabel Proporsi Belanja Pendidikan dalam APBD Rata-Rata adalah sebesar 0,967, jauh di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Proporsi Belanja Kesehatan dalam APBD (Z11) terdapat 6 Delphi (60%) yang

menilai pada range 7 dan 4 Delphi (40%) menilai pada range 6. Nilai Skor Variabel Proporsi Belanja Kesehatan dalam APBD Rata-Rata adalah sebesar 0,943, jauh di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Proporsi (Tingkat) Partisipasi Sekolah (Z12) terdapat 8 Delphi (80%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 1 Delphi (10%) pada range 5. Nilai Skor Variabel Proporsi

(Tingkat) Partisipasi Sekolah Rata-Rata adalah sebesar 0,943, jauh di atas batas minimum persetujuan.

Tabel 4 Penilaian Ahli Terhadap Variabel Demokrasi Penguasaan

Faktor Produksi Intelektual



b. Variabel Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Institusional

Pada Sub-Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi Institusional Variabel Proporsi Anggota Koperasi dari Total Jumlah Penduduk (Z13) terdapat 4 Delphi (40%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%)

menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Proporsi Anggota Koperasi dari Total Jumlah Penduduk Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Proporsi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (Z14) terdapat 3 Delphi (30%) yang menilai pada range 7, 2 Delphi (20%) menilai pada range 6, dan 4 Delphi (40%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4.

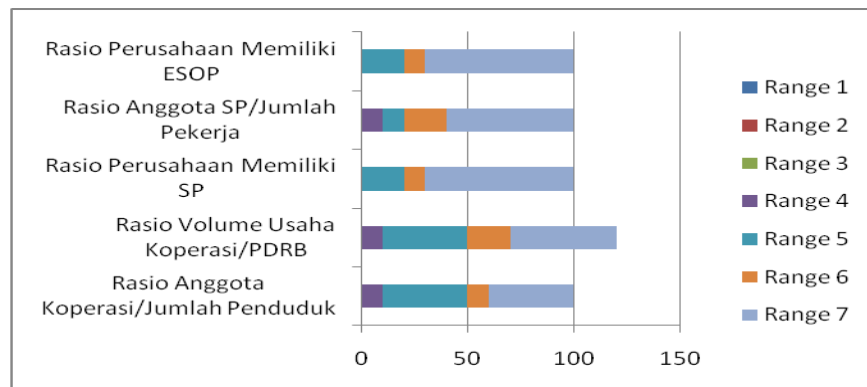
Nilai Skor Variabel Proporsi Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Rata-Rata adalah sebesar 0,814, di atas batas minimum persetujuan.

Pada Variabel Proporsi Perusahaan Yang Memiliki Serikat Pekerja (Z15) terdapat 7 Delphi (70%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi (20%) pada range 5. Nilai Skor Variabel Proporsi Perusahaan Yang Memiliki Serikat Pekerja Rata-Rata adalah sebesar 0,828, di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Proporsi Anggota Serikat Pekerja terhadap Jumlah Pekerja Total (Z16) terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada range 7, 2 Delphi (20%)

menilai pada range 6, 1 Delphi (10%) pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 4. Nilai Skor Variabel Proporsi Anggota Serikat Pekerja terhadap Jumlah Pekerja Total Rata-Rata adalah sebesar 0,900, di atas batas minimum persetujuan. Pada Variabel Proporsi Perusahaan Yang Menerapkan Pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja (Z17) terdapat 7 Delphi (70%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 6, dan 2 Delphi (20%) pada range 5. Nilai Skor Variabel Proporsi Perusahaan Yang Menerapkan Pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja Rata-Rata adalah sebesar 0,928, jauh di atas batas minimum persetujuan.

Tabel 5. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Demokrasi Penguasaan

Faktor Produksi Institusional



2). Temuan Aplikasi Delphi Putaran 2

Sesuai dengan karakteristik Metode Delphi, yaitu iterasi dan umpan balik yang

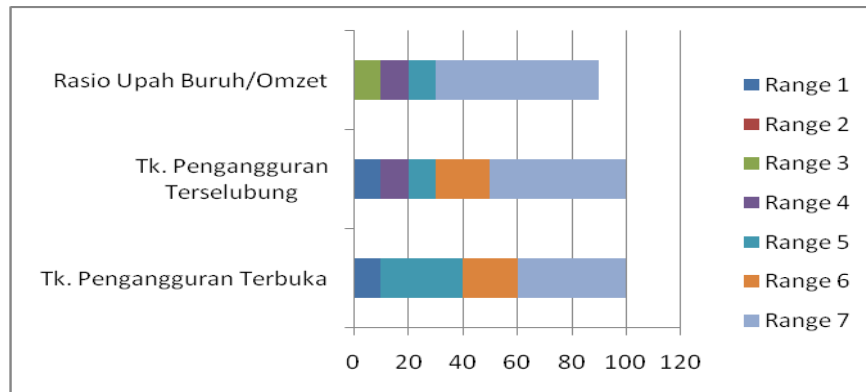
terkelola, maka responden Delphi diberi kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki jawabannya. Hal ini dilakukan setelah responden Delphi memperoleh informasi perihal hasil analisis data sementara yang menunjukkan penilaian umum para-ahli responden Delphi. Hasil analisis data putaran I tersebut selanjutnya digunakan sebagai instrumen penelitian pada aplikasi Metode Delphi putaran II. Distribusi instrumen putaran II menghasilkan temuan yang secara umum memperkuat temuan putaran sebelumnya, di mana hanya 1 responden Delphi yang mengubah jawabannya secara positif pada 1 buah variabel. Perubahan ini dilakukan pada variabel Proporsi Upah Buruh terhadap Total Omzet Perusahaan, dari yang semula dinilai pada range 4 kemudian diubah menjadi dinilai pada range 7 (maksimum). Sementara itu jawaban semua responden Delphi pada seluruh variabel yang lain pada putaran I tidak mengalami perubahan.

Sementara itu penilaian para-ahli terhadap Bobot Dimensi yang dihasilkan dari Nilai Skor Dimensi Rata-Rata menunjukkan kecenderungan penerimaan para-ahli responden Delphi terhadap nilai bobot yang diajukan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai (tingkat) persetujuan terhadap semua Bobot Dimensi yang sebesar 80%, sedangkan nilai (tingkat) ketidaksetujuan

hanya sebesar 6,66%. Tingkat ketidaksetujuan pada Dimensi Demokrasi Produksi dan Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi adalah sama-sama sebesar 3,33%. Tidak terdapat ketidaksetujuan dari para-ahli responden Delphi pada Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi. Dalam pada itu nilai (tingkat) abstain (keraguan) adalah sebesar 13,34%.

Satu-satunya perubahan jawaban yang dilakukan oleh responden Delphi selanjutnya mengubah Nilai Skor Variabel Proporsi Upah Buruh terhadap Total Omzet Perusahaan. Pada variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omzet Perusahaan (X_3) aplikasi Metode Delphi Putaran I terdapat 6 Delphi (60%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 5, 1 Delphi (10%) pada range 4, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 3. Nilai Skor Variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omzet Perusahaan pada Putaran I adalah sebesar 0,800, di atas batas minimum persetujuan.

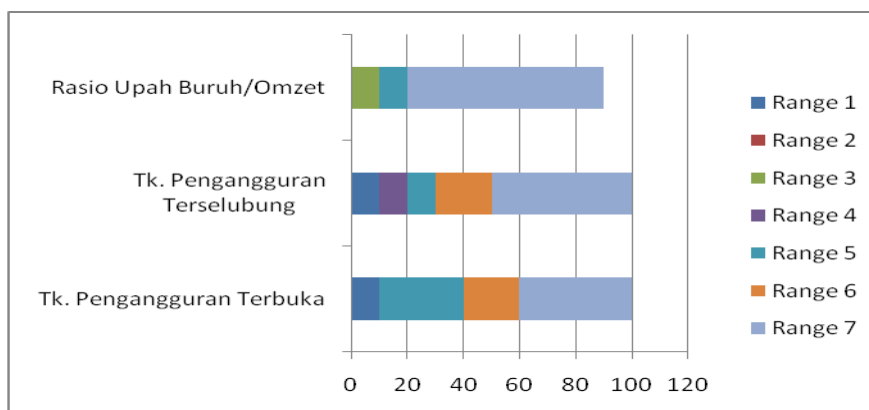
Tabel 8. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi Demokrasi Produksi Pada Putaran I (Sebelum Revisi)



Pada variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan (X3) aplikasi Metode Delphi Putaran II terdapat 7 Delphi (70%) yang menilai pada range 7, 1 Delphi (10%) menilai pada range 5, dan 1 Delphi (10%) menilai pada range 3.

Nilai Skor Variabel Rasio Upah Buruh Terhadap Omset Perusahaan pada aplikasi Metode Delphi Putaran II (revisi jawaban) naik menjadi sebesar 0,814 dan tetap di atas batas minimum persetujuan.

Tabel 9. Penilaian Ahli Terhadap Variabel Dimensi Demokrasi Produksi Pada Putaran 2 (Sesudah Revisi)



Perubahan jawaban 1 Delphi terhadap 1 variabel (Proporsi Upah Buruh terhadap Total Omzet Perusahaan) pada putaran II juga mengubah Nilai Skor Dimensi Demokrasi Produksi dari sebelumnya sebesar 0,794 menjadi sebesar 0,799. Sementara itu, Nilai Skor Dimensi Rata-Rata dan Nilai Skor Variabel Rata-Rata

lainnya tidak mengalami perubahan. Nilai perubahan yang tidak mengubah nilai desimal pertama ini kurang signifikan, sehingga penentuan Bobot Dimensi Demokrasi Produksi tetap signifikan untuk menggunakan penilaian para-ahli pada putaran II yang untuk dimensi tersebut tingkat persetujuannya sudah mencapai

80% dan tingkat ketidaksetujuannya hanya

3,3.

Tabel 10. Nilai Skor Variabel Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia Putaran II

No	Dimensi/Variabel Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI)	Batas Minimum Persetujuan	Nilai Skor Variabel Rata-Rata
X	Demokrasi Produksi (DP)	0,714	0,799*
1	Tk. Pengangguran Terbuka	0,714	0,812
2	Tk. Pengangguran Terselubung	0,714	0,771
3	Rasio Upah Buruh/Omzet Perusahaan	0,714	0,814**
Y	Demokrasi Alokasi (DA)	0,714	0,935
1	Porsi Belanja bg Penduduk Miskin	0,714	0,900
2	Rasio Pendapatan Kelompok 40% Terbawah/Total Pendapatan	0,714	0,971
Z	Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP)	0,714	0,861
Z-a	<i>Faktor Produksi Material</i>		
1	Rasio APBD/PDRB	0,714	0,814
2	Rasio PAD/APBD	0,714	0,785
3	Rasio Pembiayaan Domestik/APBD	0,714	0,828
4	Rasio APBD/Total Omzet SDA	0,714	0,814
5	Rasio Konsumsi/Kredit Konsumsi	0,714	0,700
6	Rasio Investasi Domestik/Total Investasi	0,714	0,857
7	Rasio Investasi UMKM/PDRB	0,714	0,871
8	Rasio Kredit/Tabungan	0,714	0,828
9	Rata2 Luas Kepemilikan Lahan	0,714	0,828
Z-b	<i>Faktor Produksi Intelektual</i>		
10	Rasio Belanja Pendidikan/APBD	0,714	0,967
11	Rasio Belanja Kesehatan/APBD	0,714	0,943
12	Rasio Partisipasi Sekolah	0,714	0,943
Z-c	<i>Faktor Produksi Instiusional</i>		
13	Rasio Anggota Koperasi/Jumlah Penduduk	0,714	0,828
14	Rasio Volume Usaha Koperasi/PDRB	0,714	0,814
15	Rasio Perusahaan Memiliki SP	0,714	0,828
16	Rasio Anggota SP/Jumlah Pekerja	0,714	0,900
17	Rasio Perusahaan Memiliki ESOP	0,714	0,928

* : Nilai Skor Revisi dari sebelumnya sebesar 0,794

** : Nilai Skor Revisi dari sebelumnya sebesar 0,800

Simpulan

1). Variabel yang dinilai sesuai oleh para-ahli dan mencapai nilai skor di atas batas minimum persetujuan, sehingga dapat dijadikan sebagai unsur penyusun Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI) adalah sebanyak 21 variabel yang terbagi dalam 3 Dimensi, yaitu:

A. Dimensi Demokrasi Produksi (DP) = X

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (X1)
2. Tingkat Pengangguran Terselubung (X2)
3. Rasio Upah Buruh Terhadap Total Omzet Perusahaan (X3)

B. Dimensi Demokrasi Alokasi dan Konsumsi (DAK) = Y

1. Proporsi Belanja Jaminan Sosial Bagi Penduduk Miskin Terhadap APBD (Y1)
2. Rasio Pendapatan Kelompok 40% Terbawah Terhadap Total Pendapatan (Y2)

C. Dimensi Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP) = Z

1. Rasio APBD Terhadap PDRB (Z1)
2. Rasio PAD Terhadap APBD (Z2)
3. Rasio Pembiayaan Domestik Terhadap APBD (Z3)
4. Rasio APBD Terhadap Total Omzet Hasil Eksploitasi SDA (Z4)

5. Rasio Investasi Domestik Terhadap Total Investasi (Z5)
6. Rasio Investasi UMKM Terhadap PDRB (Z6)
7. Rasio Kredit Terhadap Tabungan (Z7)
8. Rata-Rata Luas Kepemilikan Lahan (Z8)
9. Rasio Belanja Pendidikan Terhadap APBD (Z9)
10. Rasio Belanja Kesehatan Terhadap APBD (Z10)
11. Tingkat Partisipasi Sekolah (Z11)
12. Rasio Anggota Koperasi Terhadap Total Jumlah Penduduk (Z12)
13. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (Z13)
14. Rasio Perusahaan Memiliki Serikat Pekerja (Z14)
15. Rasio Anggota Serikat Pekerja Terhadap Total Jumlah Pekerja (Z15)
16. Rasio Perusahaan Yang Memiliki Pola Kepemilikan Saham Oleh Pekerja (Z16)

2). Susunan (formula) umum Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI) yang disetujui oleh para-ahli adalah:

$$DP = X1 + X2 + X3$$

.....(i)

$$DAP = Y1 + Y2$$

..... (ii)

$$DPFP = Z1 + ,...Z16$$

..... (iii)

$$\text{IDEI} = \text{DP} + \text{DAK} + \text{DPFP}$$

..... (iv)

3). Susunan (formula) Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia yang mempertimbangkan pembobotan nilai skor yang disetujui oleh para-ahli adalah:

$$\text{IDEI} = (0,79)\text{DP} + (0,93)\text{DAK} + (0,86)\text{DPFP} \dots\dots\dots (v)$$

DAFTAR PUSTAKA

Archer, Robin, *Economic Democracy: The Politics of Feasible Socialism*, Clarendon Press

Arief, Sritua, 2006, *Negeri Terjajah*, Yogyakarta, Resist Book

Aly, Bachtiar, Indradi Kusuma, Prasetyadji, 2002, *Menuju Indonesia yang Demokratis, Adil & Pluralis*, Forum Kesatuan Komunikasi Bangsa, Jakarta

Booth, Anne, 1998, *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*, London, Macmillan.

Bruyn, Severyn T., 2000, *A Civil Economy: Transforming the Market in the 21st Century*, Michigan, University of Michigan Press.

Brookings, Robert S, 1929, *Economic Democracy: America's Answer to Socialism and Communism; a Collection of Articles, Addresses and Papers*, The Macmillan company

Carnoy, Martin and Derek S., 1980, *Economic Democracy: The Challenge of 1980s*, New York, M.E. Sharpe.

Chartier, Cary, 2001, *Civil Right and Economic Democracy*

Cumbers, Andre, 2007, *Economic Democracy and Public Ownership*, Glasgow, University of Glasgow

Dahl, Robert A, 1985, *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar*, diterjemahkan oleh Akhmad Setiawan, Jakarta, Yayasan Obor.

Devune, Pat, 1995, *Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*, Yogyakarta, Tiara Wacana

Dick, Howard, et, al, 2002, *The Emergence of A National Economy: An Economic History of Indonesia 1800-2000*, Honolulu, Allen & Unwin Hawaii Press.

Eisy, M. Ridlo, 1990, "Perjuangan Nasional Perbaikan Nasib Rakyat", *Kebangkitan Nasional*, PB PWI.

Fukuyama, Francis, 1995, *Trust*, New York, Simon & Schuster Inc., Free Press Paperbacks.

Forum Rektor Indonesia, 2007, *Sistem Ekonomi yang Berkeadilan Sosial*, (naskah akademik), Makassar, FRI.

Fotopoulos, Takis, Ch. 14: Economic Democracy, dalam *The Multidimensional Crisis and Inclusive Democracy*, di akses di internet pada tanggal 12/9/2007 jam 07.46 WIB.

Fowler Jr., F. (1993). *Survey research methods*. Thousand Oaks, USA: Sage Publications.

Grossman, Gregory, 2004, *Sistem-Sistem Ekonomi*, Jakarta, Bumi Aksara

Heilborner, & Milberg, 1998, *The Making of Economic Society*, London, Prentice Hall

Hines, Collins, 2005, *Mengganti Globalisasi Ekonomi Menjadi Lokalisasi Demokrasi*, Insist Press, Yogyakarta

- Huntington, Samuel P., 1997, *The Clash of civilization and The Remaking of World Order*, India, Penguin Books.
- Koesnadi Hardjosoemantri dkk, 2004, *Program Aksi Meluruskan Reformasi*, UGM, Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta
- Kekic, Laza, 2007, *The Economist Intelegence Unit's Index of Democracy*, EIU Report 2007
- Kriegman, Orion, 1998, *The Potential for Economic Democracy n America*
- Mubyarto and Daniel W. Bromley, 2002, *A Development Alternative for Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Mubyarto, 2004, *Tekokrat dan Ekonomi Pancasila*, PUSTEP-UGM, Yogyakarta
- _____, 2004, *Revolusi Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*, PUSTEP-UGM, Yogyakarta
- _____ (ed), 2004, *Pancasila, UGM, dan Jati Diri Bangsa*, PUSTEP-UGM, Yogyakarta (akan terbit)
- _____, 2004, *Neoliberalisme dan Krisis Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta, PUSTEP & Aditya Media.
- _____, 2004, *Ekonomi Pancasila: Evaluasi Dua Tahun PUSTEP-UGM*, Aditya Media, Yogyakarta
- _____, 2004, *Ekonomi Pasar Populis*, Aditya Media, Yogyakarta
- _____, 2004, *Menggugat Sistem Pendidikan Nasional: Refleksi Pendidikan Akhir Tahun 2004*, Aditya Media, Yogyakarta
- _____, 2005, *Satu Abad Sumpah Pemuda: Visi Indonesia 2028*, Aditya Media, Yogyakarta
- _____, 2005, *Pusat Studi Non-Disipliner: Reformasi Pengajaran Ilmu-ilmu Sosial-Humaniora di Universitas Gadjah Mada*, Aditya Media, Yogyakarta
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat, Program IDT, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Mubyarto, Capres/Cawapres dan Ekonomi Rakyat, dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Bogor, Yayasan Agro Ekonomika (YAE).
- Mutis, Thoby, 2002, *Cakrawala Demokrasi Ekonomi*, Tiara Wacana, Yogyakarta
- Nyerere, Julius K., 1990, *The Challenge to The South: The Report of The South Commission*, Oxford, Oxford University Press.
- Perkins, John, 2004, *Confessions of an Economic Hit Man*, San Francisco, Berrett-Koehler Publishers Inc.
- Retnonowati Abdulgani-Knapp, 2003, *A Fading Dream: The Story of Roeslan Abdulgani and Indonesia*, Utopia Press Pte Ltd, Singapura
- Poole, Michael, 1987, *The Origin of Economic Democracy*, Routledge, London
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan, 2002, *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, BI, Jakarta
- Rachbini, Didik J, 2001, *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*, Grasindo, Jakarta
- Smith, J.W., 2000, *Economic Democracy: Political Struggle in Twenty-first Centuries*, New York, M.E. Sharpe.
- Sarbini Sumawinata, 2004, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia, Jakarta
- Selo Soemardjan, 1962, *Social Changes in Yogyakarta*, Ithaca, Cornell University Press.

- Sofian Effendi, 2004, *Revitalisasi Jati Diri UGM menghadapi Perubahan Global*, Pidato Dies Natalis ke-55, 20 Desember 2004, UGM, Yogyakarta
- Svante, Ericson & Jan-Eric Lane, 2002, *Demokratisasi Pertumbuhan*, RajaGarfindo, Jakarta
- Swasono, Sri Edi, 1987, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, UI Press, Jakarta
- Situmorang, Johnny W dkk, *Prototipe Model Pemeringkatan Koperasi Berdasarkan MDP*, dalam Infokop No 28 Tahun XXII, 2006
- The Heritage Foundation, *Index of Econmic Freedom 2007*
- Wikipedia, 2007, *Economic Democracy*, diakses di internet tanggal 12/8/2007
- Williams, 2002, Bologna and Emilia Romagna: A Model of Economic Democracy, diakses di internet tanggal 12/8/07 jam 09.49 WIB.
- Wertheim, W.F., 1961, *Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Policy*, The Hague, W. Van Hoeve Publishers.
- Wibowo, I., Francis Wahono, 2003, *Neoliberalisme*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta.